

Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru

Oleh:
Lili Romli

Abstract

In contemporary reform era, political parties in Indonesia facing many problems. The public image of political party was not good due to their lack of capabilities to function well. This functional problem derived from the institutional problem of political parties. In this paper, there are three crucial institutional problems that have to be solved by political party : 1) ideology and platform; 2) cohesivity and conflict management; and 3) political recruitment and forming of cadres.

Pendahuluan

Dibandingkan dengan bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang lain, demokrasi adalah suatu cara yang lebih baik untuk memerintah. Menurut Robert Dahl, demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang baik karena paling tidak lebih unggul dalam sepuluh hal, yaitu: (1) menghindari tirani; (2) menghormati hak-hak asasi; (3) kebebasan umum; (4) menentukan nasib sendiri; (5) otonomi moral; (6) perkembangan manusia; (7) menjaga kepentingan pribadi yang utama; (8) persamaan hak; (9) mencari perdamaian; dan (10) kemakmuran.¹

Bila kita telah memilih demokrasi sebagai cara untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, mau tidak mau, salah satu instrumen penting dalam demokrasi adalah partai politik. Dalam demokrasi, partai politik merupakan jiwa dan semangat. Tanpa partai politik, maka demokrasi tidak bisa bekerja dan berjalan. Dengan demikian, bekerja dan berfungsinya demokrasi, salah satunya, tergantung pada partai politik.

Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) mengatakan paling tidak ada tiga alasan mengapa partai politik perlu agar demokrasi berfungsi. *Pertama*, partai politik adalah kendaraan utama bagi perwakilan politik; *Kedua*, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan; dan *Ketiga*, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi.²

¹ Robert Dahl, *Perihal Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 63

² *Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis*, (Jakarta, 2006), hlm. 10

Keberadaan partai politik tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi. Partai politik merupakan salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan karena memang keberadaan partai politik untuk maksud tersebut. Dalam konteks itu, parpol harus melaksanakan sejumlah fungsi. Di antara fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh partai politik, yaitu fungsi sebagai mediasi antara pemerintah dan rakyat; pencalonan kandidat; mengorganisasi pemerintahan; mendorong akuntabilitas publik; pendidikan politik; dan pengatur konflik.³

Pada era reformasi ini partai politik tampak menghadapi krisis. Partai politik dimata publik memiliki citra yang kurang bagus. Ini terjadi karena partai-partai politik tidak atau belum mampu memainkan dan menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki dengan optimal. Partai-partai politik tidak memiliki kemampuan dalam mengerahkan dan mewakili kepentingan warganegara maupun dalam menghubungkan warganegara dengan pemerintahan.

Kondisi seperti itu ditambah pula dengan persoalan pelembagaan partai. Yang dimaksud dengan pelembagaan partai politik, menurut Huntington, adalah proses pematapan partai politik, baik dalam wujud perilaku yang memola maupun dalam sikap atau budaya. Huntington menegaskan bahwa dalam konteks pembangunan politik, yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung.

³ Tentang fungsi partai politik, antara lain dapat dilihat, Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Suatu sistem kepartaian disebut kokoh dan adaptabel, kalau ia mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia memengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik.⁴

Bagi Huntington, sebuah sistem kepartaian yang kokoh harus memiliki sekurang-kurangnya dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem partai politik masih mengalami masalah serius dari sisi kelembagaan maupun pelaksanaan demokrasi internalnya.

Perkembangan Partai Politik di Indonesia

Tumbuh dan berkembangnya partai-partai politik di Indonesia semenjak proklamasi kemerdekaan dimulai setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 4 November 1945. Maklumat tersebut berisi bahwa "Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala paham yang ada dalam masyarakat". Selanjutnya, maklumat itu memuat bahwa pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilakukannya pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.⁵

Sejak keluar maklumat itu, maka berdirilah partai-partai politik. Umumnya partai-partai politik yang didirikan adalah kelanjutan dari organisasi-organisasi sosial dan partai politik yang sudah dibentuk pada masa kekuasaan kolonial Belanda dan kekuasaan pendudukan Jepang. Di antara partai politik yang berdiri adalah Masyumi, PNI, PKI, dan PSI, untuk menyebut beberapa partai yang penting.

Dalam pembentukan partai-partai politik, pengaruh ikatan primordial tampak jelas dalam

pengorganisasian partai-partai politik. Pengaruh ikatan-ikatan primordial, seperti agama, suku, dan kedaerahan, semakin kentara dalam memengaruhi pengorganisasian partai politik. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencari dukungan massa.

Dukungan partai politik juga cenderung mengikuti perbedaan sosial keagamaan, sebagaimana diulas oleh Clifford Geertz. Ia melihat bahwa partai-partai politik yang ada mengikuti garis keagamaan antara kelompok Islam abangan dan priyayi serta kelompok Islam santri. Kelompok Islam abangan dan priyayi merupakan pendukung partai-partai politik sekuler, sedangkan kelompok Islam santri pendukung partai-partai politik yang bersifat keagamaan, terutama partai politik Islam.⁶

Pengorganisasian partai politik juga mengikuti garis aliran pemikiran, seperti dinyatakan oleh Herbert Feith dan Lance Castle. Kedua *Indosianist* ini mengatakan bahwa partai-partai politik yang ada pasca-kemerdekaan Indonesia merupakan perwujudan dari aliran-aliran pemikiran yang ada dalam masyarakat politik Indonesia. Masyumi dan NU merupakan perwujudan aliran pemikiran Islam, PNI perwujudan dari aliran nasionalisme radikal, PKI perwujudan aliran komunis, dan PSI perwujudan aliran sosialisme-demokrat.⁷

Periode Demokrasi Terpimpin merupakan salah satu periode yang kelam bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Demokrasi terpimpin menyebabkan kekuasaan terpusat di tangan presiden, yakni Soekarno. Semua kekuasaan berada digenggamannya. Partai-partai politik tidak berfungsi, bahkan jumlahnya dikurangi. Dari 28 partai politik, hanya tinggal 10 partai, yaitu: PNI, PKI, NU, PSII, Perti, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, Murba, dan Partindo.

Keberlangsungan Demokrasi Terpimpin ternyata tidak berumur panjang. Benar apa yang dikatakan oleh Hatta bahwa Demokrasi Terpimpin bagaikan rumah kertas, yang tidak akan berumur panjang.⁸ Akibat tragedi G 30 S/PKI, Soekarno jatuh dari kursi kepresidenan. Meskipun MPRS telah mengangkat Soekarno menjadi Presiden seumur hidup, tetapi MPRS kemudian mencabutnya dan menolak

⁴ Lihat Samuel Huntington, *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yel University Press, 1968.

⁵ Lihat M Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Pasang Surut*, Jakarta: Rajawaliipers, 1983.

⁶ Lihat Clifford Geertz, *Islam, Santri, dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.

⁷ Herbert Feith dan Lance Castle, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. lvi

⁸ Lihat Moh Hatta, *Demokrasi Kita*, Jakarta: Jambatan, 1966

pertanggungjawaban yang diberikan Soekarno. Dengan demikian, maka mandat MPRS terhadap Soekarno dicabut. Dengan diberhentikannya Soekarno, maka tamatlah Demokrasi Terpimpin, terkubur bersama penggagasnya.

Periode Demokrasi Terpimpin kemudian digantikan dengan Demokrasi Pancasila oleh Pemerintah Orde Baru. Dalam sejumlah kebijaksanaan politik, pemerintah Orde Baru melakukan reorganisasi dan refungsionalisasi, baik pada tingkat suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Kebijaksanaan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan stabilitas politik sebagai landasan terlaksananya pembangunan ekonomi. Dalam pandangan Orde Baru, stabilitas politik merupakan prasyarat terlaksananya pembangunan sehingga pembangunan bisa dilaksanakan, apabila tercipta stabilitas politik.

Orde Baru melihat bahwa biang kekacauan yang mengganggu stabilitas politik, antara lain adanya partai-partai politik, yang dianggap berperan mengganggu stabilitas. Hal ini berdasarkan pengalaman Demokrasi Parlementer di mana pemerintah selalu berganti-ganti diakibatkan ulah partai-partai politik. Sehubungan dengan itu, langkah yang dilakukan Orde Baru adalah melakukan penyederhanaan jumlah partai politik.

Kesembilan partai politik yang ada (Parmusi, NU, PSII, Perti, PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan Murba) dikelompokkan atas dua kelompok, yaitu: pertama, kelompok materiil-spirituil yang terdiri atas PNI, IPKI, Partai Katolik, Parkindo dan Murba; dan kedua kelompok spirituil-materiil yang terdiri atas Parmusi, NU, PSII, dan Perti.⁹

Setelah Pemilu 1971, tepatnya tahun 1973, kedua kelompok tersebut diharuskan melakukan fusi. Kelompok pertama, yang terdiri atas partai-partai Islam, tergabung dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok kedua, yang terdiri atas partai-partai nasionalis dan Kristen, membentuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan adanya fusi ini partai-partai politik yang ada menjadi tiga, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Selain menyederhanakan jumlah partai politik, rezim Orde Baru juga memberlakukan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua partai politik (termasuk juga Organisasi Massa).

Pada awal reformasi, partai politik yang ada mencapai 184 partai. Dari jumlah tersebut, 148 mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan HAM); dan 141 di antaranya memperoleh pengesahan sebagai partai politik. Dari jumlah tersebut, setelah melalui seleksi, akhirnya yang memenuhi syarat ikut Pemilu 1999 hanya 48 partai politik.

Banyaknya jumlah partai politik saat itu dapat dikatakan bahwa pada era reformasi ini mengulangi masa awal kemerdekaan sampai dengan tahun 1950-an, di mana jumlah partai politik begitu banyak. Banyaknya partai politik tersebut merupakan cermin dari struktur masyarakat. Apabila masyarakat bersifat heterogen dalam segala hal, termasuk ideologi dan aliran politik, maka akan tercermin dalam pembentukan organisasi kekuatan politik, termasuk di dalamnya partai politik. Oleh karena itu, benarlah jika Indonesia adalah bangsa yang heterogen atau plural yang memiliki banyak aliran politik atau ideologi.

Herbert Feith dan Lance Castle menganalisis masyarakat politik Indonesia pada pasca-kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 sampai tahun 1965. Menurut kedua pakar politik Indonesia ini, dalam masyarakat politik Indonesia terdapat lima aliran politik, yaitu Islam, Nasionalisme Radikal, Komunisme, Sosialisme Demokrat, dan Tradisionalisme Jawa.¹⁰

Sementara Daniel Dhakidae, mengelompokkan partai-partai politik pasca-Orde Baru atas dua jalur utama, yaitu jalur kelas dan jalur aliran. Partai yang mengambil jalur kelas membedakan dirinya berdasarkan pandangannya terhadap modal, yang pada akhirnya membagi masyarakat atas kelas pemilik modal dan kaum buruh dengan segala kompleksitasnya. Partai yang mengambil aliran, akan membedakan dirinya berdasarkan pandangan terhadap dunia dan persoalannya dan bagaimana cara memecahkannya. Agama dan kebudayaan menjadi pilihannya.¹¹

Selanjutnya Dhakidae menjelaskan bahwa partai-partai politik yang ikut Pemilu 1999 ada dua sumbu yang memisahkannya, yaitu sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Sumbu vertikal memisahkan dua kutub, yaitu partai yang berdasarkan agama dan partai yang berdasarkan

¹⁰ Herbert Feith dan Lance Castle, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. llii-lviii.

¹¹ Daniel Dhakidae, *Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi, dan Program*, (Jakarta: Kompas, 1999), hlm. 34.

⁹ Lihat Ali Moetopo, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: CSIS, 1974.

kebangsaan. Sumbu horizontal juga memisahkan dua kutub lainnya berdasarkan kelas, yaitu developmentalisme dan sosialisme radikal.

Pemetaan yang dilakukan oleh Feith dan Castle serta Dhakidae tersebut di atas menggambarkan bahwa partai-partai politik di Indonesia merupakan wujud dari banyaknya aliran politik di Indonesia. Banyaknya aliran tersebut, terwujud dalam pembentukan partai politik yang tidak memunculkan konfliktual antara aliran politik (parpol) yang satu dengan aliran politik yang lainnya. Akan tetapi, bagaimana aliran-aliran politik tersebut bersatu padu membangun kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Hasil Pemilu 1999 menunjukkan bahwa dari 48 partai politik tersebut tidak semuanya memperoleh dukungan suara atau kursi di DPR. Ada 7 partai politik yang secara signifikan memperoleh kursi di DPR, yaitu PDIP (153 kursi), Golkar (120), PPP (58), PKB (51), PAN (34), PK (7), dan PBB (13).¹²

Meski banyak partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR, pendirian partai politik relatif tetap banyak. Menghadapi Pemilu 2004, banyak partai politik yang didirikan. Tercatat kurang lebih 200 partai yang berdiri, yang merupakan akumulasi dari jumlah partai politik yang didirikan semenjak awal reformasi. Namun dari partai sebanyak itu, tercatat hanya 50 partai politik yang memperoleh pengesahan sebagai partai politik. Dari jumlah tersebut, yang lolos untuk ikut Pemilu 2004 hanya 24 partai politik.

Dari 24 partai politik peserta pemilu itu, yang lolos *electoral threshold* (ET) 3% hanya 7 partai politik, yaitu Golkar (127 kursi), PDIP (109), PPP (58), PKB (52), PD (56), PAN (53), dan PKS (45). Sementara sisanya, 17 partai politik, tidak lolos ET. Berdasarkan peraturan yang ada, ke-17 partai politik tersebut apabila ingin ikut dalam pemilu berikutnya pengurusnya diharuskan membentuk partai baru. Namun, aturan tersebut kemudian dianulir dalam UU No. 10 Tahun 2008, di mana partai politik yang memperoleh kursi, meski tidak lolos ET, bisa ikut pemilu berikutnya. Berdasarkan aturan ini, maka 9 partai politik lainnya (PBB, PBR, PDS, PPKD, PKPB, PKPI, Pelopor, dan PPDI), dan PNI Marhaenisme otomatis menjadi peserta Pemilu 2009.¹³

¹² Lihat Lili Romli (Ed), *Evaluasi Pemilu 2004: Analisis Proses dan Hasil Pemilu Legislatif*, (Jakarta: P2P LIPI, 2004), hlm. 4

¹³ Lihat Pasal 316 dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD

Dengan demikian, partai politik yang otomatis menjadi peserta pemilu ada 16 partai politik, yang terdiri atas 7 partai politik yang lolos ET 3% dan 9 partai politik yang mendapat kursi di DPR. Kemudian dari partai-partai politik yang berbadan hukum, setelah dilakukan verifikasi oleh KPU, ada 22 partai politik yang lolos verifikasi administratif dan faktual. Dengan demikian, jumlah partai politik peserta Pemilu 2009 menjadi 38 partai di tingkat nasional dan 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dengan jumlah tersebut, maka akan ada peningkatan jumlah peserta Pemilu 2009 sebanyak 14 partai di tingkat nasional dan 6 partai lokal di NAD.

Namun banyaknya partai politik tersebut, memicu munculnya kritikan dari publik. Keberadaan partai politik pada reformasi ini tidak berbanding lurus dengan fungsi yang diembannya. Artinya, keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat berbanding terbalik. Partai politik yang ada begitu mengecewakan rakyat. Mereka tidak memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, tetapi sebaliknya memperjuangkan partai, kelompok, dan kepentingan pribadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka alih-alih partai politik memperjuangkan kepentingan rakyat, atau paling tidak konstituennya, malah yang terjadi sebaliknya di mana partai politik cenderung sibuk memperebutkan kekuasaan, jabatan, dan uang. Sementara persoalan yang membelit rakyat dibiarkan begitu saja, seperti ketidakadilan, kemiskinan, ketidakamanan serta ancaman rasa takut akan konflik horizontal maupun vertikal.

Sekarang ini kepartaian di Indonesia, baik berdasarkan atas jumlah partai, kompetisi di antara partai, jarak ideologi, maupun berdasarkan pendekatan pelembagaan partai, tampaknya semua mengidap sejumlah persoalan. Dalam hal jumlah partai politik, terlihat bahwa sistem multipartai yang berjalan bersifat ekstrim. Hal ini karena jumlah partai politik yang ada sangat-sangat banyak. Dengan jumlah yang sangat banyak tersebut, tentu saja pada gilirannya mengganggu jalannya stabilitas pemerintahan karena kekuatan-kekuatan yang muncul relatif sama. Tambahan pula, dilihat dari segi ideologi membuat partai-partai politik terfragmentasi sehingga agak sukar untuk bekerja sama dan berkoalisi. Sementara dari sudut pelembagaan

partai, partai-partai politik yang ada juga mengidap persoalan.

Sejak kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah mempraktikkan sistem kepartaian berdasarkan sistem multipartai, meskipun dalam derajat dan kualitas yang berbeda. Pada masa Demokrasi Parlementer (1945–1959) diterapkan sistem multipartai dengan tingkat kompetisi yang tinggi, sementara pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), meskipun mempraktikkan sistem multipartai, tetapi tidak ada kompetisi dan hanya sekedar jumlah saja karena partai-partai politik yang ada tidak memiliki peran apa-apa. Begitu juga, pada masa Orde Baru dengan jumlah parpol yang hanya tiga, masih disebut sebagai sistem multipartai (sederhana) juga. Namun, sistem multipartai yang ada pada masa Orde Baru sama dengan saat masa Demokrasi Terpimpin. Bedanya; pada masa Orde Baru terdapat partai politik dominan, yakni Golkar, yang terus menerus menang sepanjang masa Orde Baru sehingga kerap orang menyebutnya sebagai sistem partai hegemonik.

Kini pada masa reformasi, Indonesia juga menerapkan sistem multipartai. Akan tetapi, seperti telah dikemukakan, sistem multipartai berjalan sangat ekstrim (*hyper multyparties*) karena saking banyaknya jumlah partai politik yang ada. Meskipun sudah dua kali pemilu dilaksanakan (Pemilu 1999 dan 2004), ternyata pelaksanaan pemilu ini tidak mengurangi jumlah partai politik. Bahkan sebaliknya, partai-partai politik terus bertumbuhan dan didirikan. Partai-partai politik yang didirikan itu, antara lain: dari partai-partai yang tidak lolos *electoral threshold* karena konflik internal atau perpecahan partai maupun dalam bentuk pendirian partai baru yang tidak ada kaitannya dengan kedua hal tersebut di atas.¹⁴

Persoalannya: sistem multipartai yang berjalan saat ini mengalami perluasan fragmentasi sehingga pada gilirannya akan mempersulit proses pengambilan keputusan di legislatif (DPRD). Proses pengambilan keputusan akan diwarnai oleh negosiasi-negosiasi politik jangka pendek dan mengabaikan kepentingan publik. Perlu ada agenda menuju penyederhanaan sistem kepartaian.

Dalam era reformasi ini, partai politik menjadi salah satu institusi yang penting. Partai

politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi perkembangan demokrasi Indonesia di masa depan. Meskipun muncul beragam reaksi terhadap eksistensi partai politik kekinian, semua pihak sepakat bahwa demokrasi akan semakin baik bila partai politik profesional dan akuntabel. Tantangan inilah yang menjadi pekerjaan berat yang harus disikapi bersama oleh semua komponen bangsa di mana kehadiran partai politik yang profesional, demokratis, dan akuntabel menjadi kebutuhan saat ini.

Keberadaan partai politik era reformasi ini yang seharusnya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, justru sangat mengecewakan. Partai-partai politik tidak memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, tetapi sebaliknya memperjuangkan partai, kelompok, dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kehadiran partai politik tidak lagi dirasakan oleh masyarakat. Berbagai peran, seperti fungsi pendidikan politik dan penyelesaian konflik, yang seharusnya dilakukan oleh partai politik terbengkalai. Sementara menyangkut artikulasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat, partai politik dalam kapasitasnya sebagai institusi ataupun melalui individu anggotanya belum menunjukkan *performance* yang memuaskan. Aktivitas yang dilakukan partai politik saat ini tampaknya lebih seputar urusan partai dan kelompoknya sendiri. Partai politik pada saat ini juga cenderung mengutamakan kepentingan parsial sesaat ketimbang kepentingan masyarakat dan bangsa. Faktor-faktor kepentingan golongan, kelompok, dan pribadi menjadi variabel determinan yang menentukan pandangan dan gerak partai, hal ini terjadi tidak saja di tingkat pusat namun hingga ke daerah.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan berkaitan dengan partai politik di Indonesia saat ini. Pertama, partai politik belum menjadi institusi publik yang memiliki tanggung jawab atau akuntabilitas terhadap pemilihnya. Pada masa Orde Baru, partai politik menjadi “mesin” politik penguasa sehingga partai politik lebih diarahkan pada kepentingan pelanggaran kekuasaan penguasa (*status quo*). Ketika memasuki era reformasi, partai politik seakan-akan kaget dengan tuntutan masyarakat yang besar, namun tidak disertai dengan kelembagaan yang baik. Partai politik, dewasa ini belum memperlihatkan akuntabilitas kepada konstituen.

Kedua, partai politik terjebak dalam bentuk oligarkis dalam proses pengambilan keputusan

¹⁴ Lihat Lili Romli, “Mencari Format Sistem Kepartaian di Indonesia”, dalam *Jurnal Politika*, Vol. 2 Tahun 2006.

strategis. Kecenderungan selama ini menunjukkan pengambilan keputusan partai politik bersifat tertutup dan hanya ditentukan oleh sekelompok kecil elit partai. Persoalan mekanisme internal dalam pembuatan keputusan dicirikan dengan sentralisasi dalam pengambilan keputusan. Peran pengurus pusat masih dominan, dan terkadang berbeda dengan aspirasi daerah.

Ketiga, terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi partai. Secara garis besar, fungsi partai politik mencakup fungsi pendidikan politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta fungsi penyelesai konflik. Terhadap fungsi-fungsi yang dimiliki oleh partai-partai politik tersebut, keluhan yang muncul adalah partai politik belum melaksanakan fungsinya secara maksimal.

Masalah Kelembagaan Partai Politik

Partai politik masih mengalami masalah serius dari sisi kelembagaan. Dalam konteks ini paling tidak, ada tiga masalah terkait masalah kelembagaan partai politik. Ketiga masalah tersebut, yaitu ideologi dan platform, kohesivitas dan manajemen konflik, serta rekrutmen dan kaderisasi partai politik.

1. Ideologi dan Platform

Setiap partai politik dibentuk dengan mendasarkan diri pada ideologi yang hendak diusungnya. Ideologi ini yang kemudian menjadi identitas partai. Untuk membedakan antara partai yang satu dengan yang lain dapat dilihat dari ideologi yang dianut oleh partai yang bersangkutan. Selain itu, ideologi juga merupakan basis perjuangan atau cita-cita yang ingin dicapai suatu partai politik. Ideologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu partai politik dan seharusnya melekat pada kehadiran suatu partai politik.

Ideologi, yang merupakan sistem nilai dan norma, tentu masih bersifat abstrak. Perlu ada penjabarannya lebih lanjut. Ideologi yang dianut oleh suatu partai politik perlu diterjemahkan ke dalam hal-hal yang riil dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan cara ini akan membantu masyarakat memahami dan mengerti tentang ideologi, yang dianut oleh suatu partai politik.

Cara untuk menerjemahkan ideologi yang dimiliki oleh suatu partai politik ke dalam hal-hal yang riil dan konkret dirumuskan dalam

bentuk *platform* partai politik. Platform partai berisikan panduan umum dan garis besar arah kebijakan partai dalam kontribusinya terhadap permasalahan bangsa dan negara. Platform partai memuat hal-hal penting dan mendasar yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penyusunan hal-hal yang harus dilakukan, seperti program kerja dan isu politik. Platform partai merupakan cetak biru, di mana sistem nilai dan norma (ideologi) diterjemahkan dan menjadi landasan bagi penyusunan hal-hal yang bersifat lebih konkret.¹⁵

Bagaimana tentang ideologi dan platform partai-partai politik di Indonesia. Apabila merujuk pada asas partai yang dimiliki oleh masing-masing partai politik, maka secara garis besar partai-partai politik berdasarkan pada tiga ideologi, yaitu Islam, Nasionalisme, dan Sosialisme Demokrat. Dari ketiga ideologi tersebut, sebagian besar partai-partai politik yang ada mendasarkan diri pada ideologi Islam dan Nasionalisme (Pancasila).

Aneka Asas Beberapa Parpol

No	Asas Partai Politik	Nama Partai Politik
1	Pancasila	PDIP, Golkar, PD, PDS, PKB, PAN, PKPI, PPD, PPD, PSI, PPD, Pelopor, dan Patriot Pancasila.
2	Pancasila dan UUD 1945	PBSD
3	Pancasila berasaskan kekeluargaan dan gotong royong	Partai Merdeka
4	Keadilan, Demokrasi, dan Pancasila	PIIB
5	Islam	PPP, PKS, PBB, PBR, PPNU, PMB, PKNU
6	Marhaenisme Ajaran Bung Karno	PNI Marhaenisme dan PNBK

Sumber: Tomi Legowo, *Pemilihan Presiden Langsung*, Jakarta: Ristek, 2004, hlm. 63.

Islam sebagai ideologi yang dimiliki oleh partai-partai Islam, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan antara partai Islam yang satu dengan partai Islam yang lainnya. Demikian juga, nilai-nilai agama –terutama konsep *amar ma'ruf nahi munkar* dan *rahmatan lil alamin*, yang diambil dari ajaran Islam yang dianut oleh PAN maupun PKB, pada dasarnya tidak berbeda dengan kedua partai Islam di atas. Perbedaannya hanya terletak pada peletakan asas Pancasila, nasionalisme, pluralisme, dan keterbukaan pada PAN dan PKB, misalnya.

¹⁵ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 119.

Pada sisi yang berseberangan, PDIP dan Partai Demokrat pada dasarnya lahir dari ideologi yang sama, nasionalisme. Namun demikian, dalam menerjemahkan nasionalisme sebagai ideologi, Partai Demokrat dan PDIP mempunyai pandangan yang berbeda. Semangat nasionalisme menurut Partai Demokrat diinterpretasikan sebagai tidak membedakan ras, suku, bangsa, jenis kelamin, profesi, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, PDIP berpendirian bahwa nasionalisme berkaitan dengan wawasan kebangsaan, sebagai cetusan rasa memiliki bangsa dan negara yang harus dipelihara kelanggengannya.

Dasar nasionalisme yang melekat pada PDI dan kemudian diteruskan oleh PDIP diambil dari konsepsi Marhaenisme yang dianut oleh Kebangkitan PNI 1927, yang merupakan cikal bakal ideologi nasionalisme PDIP. Berdasarkan ideologi nasionalisme-marhaenisme ini pula kemudian PDIP mengambil jati diri (identitas) sebagai partai kerakyatan.

Persoalan yang muncul, ideologi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik tersebut belum dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam bentuk yang riil dan konkret. Umumnya partai-partai politik yang ada masih terpaku pada ideologi abstrak yang mereka anut tersebut, dan ideologi yang mereka miliki belum sampai dikonkretkan dalam bentuk cetak biru (platform) berupa program dan kebijakan-kebijakan yang riil. Walaupun ada program dan kebijakan yang mereka rumuskan, itu masih tetap bersifat umum.

Platform partai dipandang penting untuk dua sasaran. *Pertama*, sebagai instrumen komunikasi kepada massa konstituen tentang apa yang diperjuangkan partai. Selain mencerminkan identitas partai, platform juga menjadi panduan arah partai ketika mempunyai akses terhadap kekuasaan. Dalam konteks ini, platform dapat dilihat sebagai proposal yang ditawarkan partai kepada konstituen dan masyarakat pemilih. *Kedua*, platform adalah cara pandang partai tentang bagaimana seharusnya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mengelola berbagai bidang. Platform adalah turunan dari ideologi partai, yang memuat nilai, harapan, dan *bench mark* normatif partai. Dengan demikian, bagi anggota partai, platform merupakan acuan sikap dan tindakan dalam kehidupan politik mereka sehari-hari.

Karena belum diterjemahkan secara riil, maka tidak heran bila sulit menemukan perbedaan

antara partai politik yang satu dengan yang lainnya. Padahal titik utama untuk membedakan antara partai yang satu dengan yang lainnya terletak pada, seperti dikemukakan di atas, ideologi dan platform partai politik. Maka dari itu, ideologi dan platform ini menjadi ciri dan identitas suatu partai politik, yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, saat ini ada banyak partai Islam, namun publik tidak dapat memahami secara jelas apa yang membedakan antara satu partai dengan partai lainnya. Hal ini diakui oleh Suryadharma Ali, Ketua Umum DPP PPP dalam sebuah pertemuan internal partai. Menurutnya, aktivis partainya harus prihatin terkait dengan pertanyaan yang muncul di masyarakat mengenai perbedaan signifikan antara PPP dengan parpol lain, khususnya yang tidak memilih asas Islam.¹⁶

Partai-partai lain yang mengklaim diri lahir dari atau dilahirkan oleh kalangan nasionalis juga tidak mampu menunjukkan diferensiasi yang nyata. Munculnya banyak partai dari basis ideologi yang sama lebih didorong oleh ketidakmampuan untuk mengkompromikan perbedaan pandangan atau kepentingan di dalam “keluarga besar” masing-masing, khususnya dalam soal pemilihan pimpinan partai. Kesulitan yang sama juga ditemukan ketika publik membandingkan kebijakan atau sikap partai-partai terhadap isu yang berkembang dalam kehidupan bernegara. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata di antara mereka. Dalam istilah Subangun, jenis produk yang ditawarkan partai tidak jelas dan tidak dapat dikenali serta tidak lebih dari aroma. Oleh karena itu, ikatan rasional pemilih dengan partai menjadi kosong. Memilih partai pada tiap pemilu ibarat memilih barang yang berganti terus-menerus, sesuai tren yang ada. Pilihan terhadap partai baginya lebih tampak seperti *window shopping* semata.¹⁷

2. Kohesivitas dan Manajemen Konflik

Sejarah kepartaian di Indonesia tidak pernah lepas dari konflik. Semenjak zaman pergerakan hingga era reformasi, partai-partai politik selalu dilanda oleh konflik. Pada masa pergerakan, konflik melanda Partai Nasional Indonesia (PNI)

¹⁶ “Masyarakat Tidak Tahu Nilai Lebih PPP”, *Republika*, 29 Maret 2008.

¹⁷ Subangun, “Pemasaran Partai Politik”, *Kompas*, 15 April 2008.

sehingga melahirkan Parindra dan Partai Pendidikan Nasional. Begitu juga dengan Sarekat Islam (SI), yang pecah menjadi SI Merah dan SI Putih.

Konflik partai juga terjadi pada masa pasca-kemerdekaan Indonesia. Untuk menyebut beberapa, konflik juga melanda Partai Masyumi. Para pendukung Masyumi ke luar satu persatu, mula-mula PSII, kemudian disusul oleh NU. Konflik juga terjadi di kalangan nasionalis, kita catat ada dua PIR, yaitu PIR Hazairin dan PIR Wongsonegoro.

Pada Orde Baru dengan jumlah partai politik hanya dua, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), ternyata kedua partai hasil fusi ini selalu dilanda konflik tak berkesudahan. Konflik yang terjadi di PPP umumnya disebabkan karena perbedaan antarunsur pendukung, terutama antara NU dan MI. NU kemudian keluar dari PPP tahun 1984. Sementara di PDI, akibat konflik yang terjadi menyebabkan Megawati dan para pendukungnya keluar dari PDI, kemudian membentuk PDI Perjuangan.

Pada masa reformasi, “penyakit lama” itu ternyata masih ada dalam partai-partai politik kita. Kita selalu disuguhi oleh suasana konflik partai politik. Sebut saja misalnya konflik yang terjadi pada Golkar sehingga kemudian melahirkan partai-partai baru, misalnya Partai MKGR, PKPI, dan PKPB. Konflik di PPP melahirkan Partai Persatuan (PP) dan PPP reformasi, yang kemudian menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR). Konflik di PDIP melahirkan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Indonesia Tanah Airku (PITA), Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR), dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP). Konflik di PBB melahirkan PAS dan PII. Konflik di PKB melahirkan PKD dan PKNU. Konflik di PD antara lain melahirkan Partai NKRI.¹⁸

Pada umumnya, konflik di dalam tubuh partai politik disebabkan oleh hal yang relatif tidak jauh berbeda antara satu partai dengan yang lain. Beberapa konflik yang pernah mencuat di media massa, di antaranya adalah konflik antarfaksi, konflik pada kongres partai (cabang, daerah, dan nasional), konflik personal antarpengurus dan konflik antartingkat pengurusan (vertikal), ataupun konflik

antarpengurus pada tingkatan yang sama atau antarsayap partai (horizontal).

Konflik muncul sebagai konsekuensi logis dari hukum pasar: kekuasaan yang “sedikit” diperebutkan oleh orang “banyak”. Untuk mendapatkannya pihak-pihak terkait harus berkompetisi. Di dalam partai yang memiliki pelembagaan yang baik, kompetisi tersebut diatur di dalam mekanisme yang sudah terlembaga dan disahkan menjadi statuta partai ataupun anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Dengan adanya aturan main yang terlembaga siapa pun yang memenangkan kompetisi akan mampu mendapatkan kekuasaan itu dengan elegan, tanpa memunculkan keberatan yang berarti dari pihak yang kalah.

Konflik yang menjangkiti partai-partai politik ini terjadi karena tidak adanya tradisi berpartai di kalangan elit-elit kita. Setiap perbedaan selalu diakhiri dengan perpecahan, tidak dengan konsensus. Tampaknya perpecahan sudah menjadi bagian dari perilaku elit politik. Padahal dalam politik yang dituju dari perbedaan-perbedaan adalah untuk menuju konsensus bukan perpecahan karena yang mereka perjuangkan adalah kepentingan rakyat.

Apabila dalam partai politik terjadi konflik, maka pengelolaannya tidak melibatkan pengadilan. Kader politik harus mengelola konflik internalnya dan penyelesaiannya melalui mekanisme rumah tangga internal partai politik. Ini penting dilakukan dalam rangka untuk memberikan pendidikan politik pada partai politik agar bisa mewujudkan tradisi mengelola konflik internalnya secara elegan dan dewasa. Partai politik “dipaksa” mengatasi konflik internalnya sebagai jalan untuk mendewasakan cara berdemokrasi. Saatnya kader-kadaer partai politik menghormati mekanisme internal partai politiknya. Hal ini juga untuk mendidik para kader partai politik untuk menghormati aturan rumah tangganya sendiri.

Mengapa konflik partai politik harus diselesaikan melalui mekanisme internal? Mekanisme penyelesaian konflik melalui mekanisme internal akan membendung bentuk-bentuk intervensi dari luar. Apabila penyelesaian konflik melalui pengadilan, kemungkinan akan terjadi manuver-manuver kepentingan untuk memengaruhi keputusan yang akan terjadi. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian konflik dilakukan melalui mekanisme internal dalam rangka menanamkan dan menumbuhkan tradisi berpartai di kalangan elit-elit politik.

¹⁸ Lihat Lili Romli, *Islam Yes. Partai Islam Yes*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2006.

Dalam upaya melembagakan penyelesaian konflik internal itu, maka telah diatur melalui UU Partai Politik. Dalam UU Partai Politik dicantumkan tentang mekanisme penyelesaian konflik dengan membentuk semacam badan penyelesaian konflik (atau apa pun namanya), yang berfungsi menyelesaikan setiap perbedaan atau konflik yang terjadi di dalam tubuh partai politik. Badan ini tercantum dalam AD/ART partai politik.

Berkaitan dengan mekanisme penyelesaian konflik, beberapa partai memiliki lembaga untuk menyelesaikan konflik internal tersebut. Ada partai politik yang memiliki Badan Arbitrase Partai (BAP). Lembaga ini menangani penyelesaian sengketa di tingkat pusat, dan merupakan peradilan banding yang mengeluarkan keputusan final dan mengikat.

Sementara itu, dalam mekanisme penyelesaian konflik, ada partai yang menggunakan pendekatan kultural dan agama dalam penyelesaian konflik internal, yang mekanisme kerjanya tergantung pada tokoh partai di segala tingkatannya. Persoalannya adalah penerapan mekanisme seperti itu tidak memiliki jaminan secara kelembagaan seperti terlihat dari adanya penyelesaian konflik yang berhasil, tetapi tidak sedikit pula yang gagal. Mekanisme pendekatan kultural dan agama akan efektif manakala di dalam partai tersebut ada figur sentral yang disegani dan didengar oleh sebagian besar anggota partai. Bila tidak ada figur seperti itu, maka kecenderungan berlanjutnya konflik akan semakin nyata.

3. Rekrutmen dan Kaderisasi

Dalam setiap organisasi, anggota merupakan sumber dukungan utama. Dalam organisasi politik, peran anggota signifikan karena para anggota ini akan berperan sebagai juru bicara untuk menyuarakan dan menyebarluaskan platform dan program partai kepada masyarakat. Selain itu, anggota merupakan sumber kaderisasi yang dapat melahirkan calon-calon pemimpin partai politik.

Untuk mengisi keanggotaan tersebut, partai politik melakukan rekrutmen anggota. Partai politik yang baik tentu memiliki sistem rekrutmen yang baik. Sistem rekrutmen itu mencakup pola seleksi, penjenjangan, dan pendidikan bagi para anggotanya. Dengan demikian, tidak sembarangan seseorang dapat secara otomatis

memperoleh keanggotaan tanpa melalui seleksi terlebih dahulu.¹⁹

Selain rekrutmen anggota, partai politik yang melembaga dengan baik akan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi anggotanya secara terus menerus. Tujuan dari kaderisasi dan pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas anggota sehingga nantinya mereka (para anggota) mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat, bangsa, dan negara.²⁰

Kaderisasi dan pendidikan politik dilakukan oleh partai politik dalam rangka mencetak pemimpin. Oleh karena itu, partai politik yang terlembaga akan melakukan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan secara reguler. Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenjang dan ruang lingkup masing-masing tingkatan kepengurusan. Melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini, diharapkan nanti akan lahir kader pemimpin partai yang berkualitas.

Persoalan yang umumnya muncul pada partai-partai politik saat ini adalah kurang melembaganya proses rekrutmen anggota. Pola seleksi, penjenjangan, dan pendidikan bagi para anggota kurang dilakukan secara lebih memadai. Memang ada beberapa partai politik yang sudah melakukan seperti itu, namun sebagian partai politik yang lain belum melakukan secara melembaga. Fenomena munculnya "kader instan", ketidaksiapan parpol dalam mengajukan calon anggota legislatif atau eksekutif, semua itu menunjukkan bahwa partai politik belum melakukan pola rekrutmen secara sistematis dan ajeg.²¹

Sementara itu, dalam sistem keanggotaan semua partai telah menggunakan Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi mereka yang telah menjadi anggota partai. Namun, persoalannya adalah belum semua partai politik memiliki data yang pasti dan akurat tentang jumlah anggota yang terdaftar di masing-masing partai yang ada. Yang ada baru berupa klaim yang dikemukakan oleh masing-masing partai politik. Selama ini yang

¹⁹ Lihat, IPCOS, *Partai dan Kita*, (Jakarta, 2001), hlm. 28.

²⁰ Tentang kaderisasi dan rekrutmen partai politik, lihat Michael Rush dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawaliipers, 2002), hlm. 183.

²¹ Fenomena tentang munculnya "kader instan" ini banyak diberitakan di berbagai media massa dengan beragam tanggapan, seperti di Kompas, Media Indonesia, dan Koran Tempo.

terdata dengan baik baru sebatas jumlah pengurus partai.

Serupa dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik yang masih mengidap masalah, maka begitu juga dalam soal kaderisasi dan pendidikan politik masih sangat lemah. Memang harus diakui, ada beberapa partai politik sudah melakukan proses kaderisasi secara berjenjang. Namun demikian, proses kaderisasi masih terbatas pada pemahaman kader tentang visi-misi partai politik yang bersangkutan, belum sampai pada promosi hasil kaderisasi dan pendidikan politik untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut, umumnya partai-partai politik mengambil dari luar kader atau anggota partai yang bersangkutan.

Fenomena kader partai “loncat pagar” dari partai yang satu ke partai politik yang lainnya menunjukkan bahwa proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik belum berhasil menanamkan loyalitas yang kuat. Bisa jadi sistem nilai dan norma (ideologi) suatu partai belum berhasil terinternalisasi ke dalam diri para kader. Akhirnya, kader dengan mudah “loncat pagar” ke partai lainnya.

Catatan Penutup

Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, dalam demokrasi perwakilan, partai politik merupakan salah satu institusi penting untuk bekerjanya demokrasi. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, maka partai politik juga mesti melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik pula.

Upaya agar partai politik berfungsi dengan baik, usaha yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui penguatan kelembagaan partai politik agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan optimal. Dalam konteks tersebut, upaya penguatan platform partai, kaderisasi, rekrutmen politik, dan menciptakan kohesivitas internal partai merupakan suatu keniscayaan yang mesti segera dilakukan oleh partai-partai politik.

Penulis berpendapat, bila faktor-faktor tersebut (platform, kaderisasi, rekrutmen, dan kohesivitas internal) begitu kuat dan kokoh pada diri partai politik, maka pada gilirannya akan terbentuklah partai politik yang kuat dan tangguh pula. Hal ini karena faktor-faktor tersebut adalah salah satu basis utama bagi kuat dan tanggunya partai politik.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dahl, Robert. 2001. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dhakidae, Daniel. 1999. *Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi, dan Program*. Jakarta: Kompas.
- Feith, Herbert dan Lance Castle. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Geertz, Clifford. 1981. *Islam, Santri, dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hatta, Moh. 1966. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Djambatan.
- Huntington, Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- IPCOS. 2001. *Partai dan Kita*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES) & Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS).
- Karim, M. Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Pasang Surut*. Jakarta: Rajawaliipers.
- Legowo, Tomi. 2005. *Pemilihan Presiden Langsung 2004: Dokumentasi, Analisis, dan Kritik*. Jakarta: Ristek.
- Moertopo, Ali. 1974. *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS.
- Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD). 2006. *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis*. Den Haag: The Netherlands Institute For Multiparty Democracy.
- Romli, Lili (Ed.). 2004. *Evaluasi Pemilu 2004: Analisis Proses dan Hasil Pemilu Legislatif*. Jakarta: P2P LIPI.
- Romli, Lili. 2006. “Mencari Format Sistem Kepartaian di Indonesia”. *Jurnal Politika*. Vol. 2 Tahun 2006.
- Romli, Lili. 2006. *Islam Yes. Partai Islam Yes*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rush, Michael, dan Phillip Althoff. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawaliipers.
- Subangun, Emmanuel. 2008. “Pemasaran Partai Politik”. *Kompas*. 15 April 2008
- Tim Kompas. 2004. *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- “Masyarakat Tidak Tahu Nilai Lebih PPP”. *Republika*. 29 Maret 2008.